

UPAYA UNITED NATION OFFICE ON DRUGS CRIME (UNODC) DALAM MENEKAN PRODUKSI OPIUM DI WILAYAH SEGITIGA EMAS (STUDI KASUS DI MYANMAR TAHUN 2011-2014)

Agus Salim¹
Nim. 1002045198

Abstract

Poverty in Myanmar is a major factor in the development of opium cultivation. In addition to poverty, the number of debts and limited access to markets has resulted in conventional farming unable to meet the needs of money in Myanmar. The purpose of this research is to know the United Nation Office On Drugs Crime (UNODC) efforts in repressed opium production in golden triangle region in Myanmar in 2011-2014. This research used descriptive analytic, the author used the concept of international regimes and trans organized crime to analyze this research. Data analysis technique used library research. UNODC's efforts to repressed opium production in Myanmar by conducting the Global SMART Program, UNODC illicit monitoring program (ICMP), alternative development for opium farmers in Myanmar, assistance from the World Food Program (WFP), and prevention and care of HIV / AIDS for opium addicts.

Keywords : *UNODC efforts, Myanmar opium, Golden Triangle*

Pendahuluan

Perdagangan obat-obatan terlarang merupakan salah satu bisnis dengan nilai jual yang tinggi, sehingga merupakan salah satu pemicu tindak kriminal dan bisnis ilegal yang bernilai tinggi serta sangat berbahaya bagi generasi muda. Bisnis ilegal ini menjadi terorganisir dengan baik sehingga bisa mencapai pasar internasional. Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang biasanya dipakai dokter untuk membius pasien saat akan dilakukan operasi atau obat-obatan yang digunakan untuk proses penyembuhan penyakit tertentu, akan tetapi beberapa kalangan menggunakan obat-obatan tersebut dengan tujuan yang tidak baik, sehingga menimbulkan efek bahwa obat-obatan yang digunakan untuk medis tersebut menjadi obat-obatan yang terlarang.

Produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara merupakan aktivitas lama yang telah ditemukan di kawasan ini sejak abad ke-19. Produksi narkoba di Asia Tenggara paling banyak ditemukan di Laos, Myanmar, dan Thailand. Di Myanmar lahan budidaya opium banyak ditemukan di dua distrik yang berada di propinsi Shan, khususnya distrik Wa dan distrik Kokang yang terletak di sepanjang perbatasan antara Myanmar dengan Cina. Letak geografis distrik Wa dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agussyamsuni@gmail.com

distrik Kokang yang berbatasan langsung dengan Cina memberikan keuntungan tersendiri bagi proses perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang selanjutnya. Selain di Laos, Myanmar, dan Thailand, ladang penanaman opium juga ditemukan di Vietnam namun dalam skala yang lebih kecil.

Dalam masalah kemiskinan maka petani kawasan segitiga emas lebih memilih untuk membudayakan opium. Peningkatan opium di dasari karena bertambahnya masyarakat miskin yang tidak punya pilihan, utang rumah tangga, aksesibilitas masyarakat miskin yang jauh dari pasar dan yang ada hanya opium dan mereka lebih memilih meningkatkan produksi opium untuk memenuhi kebutuhan petani yang ada di kawasan segitiga emas tersebut.

Sebutan “Segitiga Emas” atau *The Golden Triangle* yang merupakan daerah perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos merupakan penghasil 60% produksi opium dan heroin di dunia. Myanmar tetap menjadi produsen opium teratas di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan. Myanmar dan Laos yang memproduksi antara 731 metrik ton (mt) dan 823 mt opium untuk pasar obat regional dan internasional. Untuk produksi opium jenis heroin terbaik terdapat di Laos, Myanmar, dan Thailand. Karena di tiga negara tersebut, banyak terdapat bukit-bukit dengan rendahnya minyak yang terkandung di dalamnya dan tidak adanya fasilitas irigasi. Sehingga, tanaman opium dapat tumbuh subur di tiga negara tersebut. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba.

PBB sebagai organisasi terbesar dunia yang mencakup dari berbagai negara di seluruh kawasan sudah berupaya untuk menanggulangi kejahatan transnasional ini. Dengan dibentuknya *United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)*, negara di seluruh dunia bergabung dalam konferensi ini dan meratifikasi perjanjian hukum.

Guna meminimalisir perdagangan narkoba, di Asia Tenggara telah ada kerjasama dalam bentuk pertemuan khusus menangani masalah narkoba sejak ditandatanganinya deklarasi *ASEAN (Association Southeast Asian Nations)* dalam hal prinsip-prinsip memerangi penyalahgunaan narkoba (*ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*) pada sidang AMM (*ASEAN Ministerial Meeting*) di Manila pada tanggal 26 Juni 1976. Sebuah nota kesepahaman antara Sekretariat ASEAN dan *United Nation On Drugs and Crime (UNODC) Drug Control and Crime Prevention Cooperation* telah disetujui. MoU ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang lebih dekat pada isu-isu terkait pengawasan narkoba dan pencegahan kejahatan.

UNODC menganggap permasalahan narkoba sebagai permasalahan yang serius, keseriusan ini dituangkan ke dalam beberapa konvensi yang dimaksudkan untuk menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia, menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana upaya united nation office on drugs crime (UNODC) dalam menekan produksi opium di wilayah segitiga emas (studi kasus di Myanmar tahun 2011-2014).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Rezim Internasional

Rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional.

Perbedaan utama dari rezim dengan institusi terletak pada siapa yang digolongkan menjadi aktor. Institusi melihat organisasi internasional sebagai aktor dan mencermati apa yang organisasi internasional lakukan. Kontras dengan rezim yang melihat aktor yang utama adalah negara yang mana merupakan sumber yang mempengaruhi politik internasional. Norma, aturan dan prosedur dalam pembuatan keputusan itu berhubungan dengan ekspektasi dan perilaku dari negara. Perbedaan antara rezim dan institusi dalam mempelajari organisasi internasional adalah jika institusi melihat apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut sedangkan rezim melihatnya pada perilaku negara yang mempengaruhi norma serta aturan yang dianut oleh organisasi internasional yang pada akhirnya menciptakan suatu perilaku pada organisasi tersebut.

Terdapat empat teori dalam rezim internasional, yakni teori struktural, *game-theory*, teori fungsional dan teori kognitif

1. *Teori struktural* secara khusus meliputi tentang teori *hegemonic stability* dimana teori tersebut menerangkan bahwa keadaan internasional yang kebanyakan dipegang oleh negara-negara adikuasa sebagai pengaturnya itu mempengaruhi kerjasama.
2. *Game-theory* menerangkan tentang bagaimana sebuah kerjasama dapat terlaksana dalam kondisi anarkis yang mana dalam keadaan tersebut, otoritas supranasional sangatlah lemah untuk menciptakan sebuah kepatuhan.
3. *Teori fungsional* menjelaskan mengenai efek perilaku atau lembaga. Teori ini juga menjelaskan mengenai kekuatan rezim, terutama teka-teki mengapa kepatuhan terhadap rezim cenderung untuk bertahan bahkan ketika kondisi struktural yang awalnya memunculkan rezim tersebut berubah.
4. *Teori kognitif* merupakan percampuran dari tiga teori sebelumnya. Teori struktural, *game-theory* dan fungsional beranggapan bahwa kerjasama terjadi dalam penyelesaian isu-isu yang relatif jelas, sementara *cognitivist* beranggapan jika kooperasi tidak dapat tercapai tanpa adanya pengetahuan, ideologi dan aspek-aspek kognitif lain yang diperlukan.

Fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok:

1. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan stafnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukan instrument yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan

- mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan dimana dalam hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran - ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
 5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

Konsep Transnational Organized Crime (TOC)

Transnasional Organized Crimes (TOC) adalah salah satu kejahatan terorganisir dalam cakupan internasional atau melibatkan banyak negara. TOC ini sama halnya dengan sebuah organisasi internasional, namun TOC ini lebih bertujuan melakukan hal-hal ilegal seperti terorisme, perdagangan manusia, penjualan narkoba, pencucian uang, korupsi, perdagangan atau produksi senjata api ilegal, penyelundupan migran. TOC memiliki sistem khusus dalam menjalankan visi dan misi mereka. Dalam menjalankan misi mereka dapat melakukan kekerasan dan dilakukan dengan sistematis yang sudah ditentukan.

TOC ini pun menjadi sulit diselesaikan karena ini mencakup banyak negara dan mereka saling berhubungan tidak ada tindakan yang tidak diketahui, mereka menggunakan berbagai cara agar sulit diketahui oleh negara, mereka terus berkembang di setiap negara. Mereka membuat aliansi dan bekerjasama dalam melakukan kejahatan negara. Narkotika, seperti yang kita ketahui bersama merupakan bagian dari obat penenang yang disalah gunakan pemakaiannya sehingga menyebabkan halusinasi tinggi, ketergantungan obat, kerusakan mental, dan bahkan kematian. Di satu sisi, narkotika merupakan obat yang digunakan dalam pembiusan (penenang) dalam kaidah kedokteran serta dosis yang tepat. Namun, manfaat positif dari narkotika tersebut disalahgunakan oleh organisasi tertentu untuk dijadikan sebagai keuntungan sepihak.

Ada 6 Karakteristik kejahatan transnasional berdasarkan pertemuan *Internasional The World Ministerial Conference on Organized Crime* di Nepal pada tahun 1994, yaitu:

- a. Suatu organisasi yang melakukan kejahatan (*group organization to commit crime*)
- b. Memiliki jaringan hirarkis atau hubungan personel yang memberikam kewenangan pemimpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut (*hierarcical links or personal relationship which permit leader to control the group*)
- c. Kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar (*violence, intimidation, and coruption used to earn profit or control teritories or markets*)
- d. Mencuci uang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari kegiatan kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah (*laundring of illicit process both in furtherence of criminal activity and to infiltrate in legitimacy economy*)
- e. Memperluas jaringan operasinya keluar negeri (*the potential for expansion into any new activities and beyond national boorders*)
- f. Bekerjasama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya (*cooperation with other organized transnational criminal group*)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif analitik, yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan satu atau lebih fenomena dengan beberapa pertimbangan, yang mana penulis memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai upaya UNODC dalam menanggulangi perdagangan dan peredaran narkoba ilegal dikawasan Asia Tenggara khususnya Myanmar. Data yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh

melalui telaah pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dari literatur seperti buku, surat kabar, atau majalah dan situs-situs dari internet. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, yakni data-data tersebut diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku, situs-situs internet, jurnal, surat kabar dan sumber-sumber lain yang terkait. Teknik analisa data yang digunakan adalah data kualitatif interpretatif. Yaitu teknik yang menghubungkan variabel-variabel dan menjelaskan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Hasil Penelitian

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang tingkat kejahatan transnasionalnya relatif tinggi khususnya perdagangan narkoba. Hal ini disebabkan karena kejahatan transnasional marak terjadi di kawasan yang berdekatan antar negara yang meliputi Burma (Myanmar), Laos utara dan bagian Thailand utara, kawasan tersebut terkenal dengan sebutan Segitiga Emas. Pada tahun 1886, Inggris menguasai wilayah timur laut Burma, negara bagian Shan. Produksi dan penyelundupan opium di sepanjang wilayah bawah Burma berkembang meskipun Inggris berusaha mempertahankan monopoli ketat dalam perdagangan opium. Sampai hari ini, negara bagian Burma Shan (sekarang dikenal sebagai Myanmar) adalah salah satu pusat produksi opium terkemuka di dunia. Pada tahun 1940an, Asia Tenggara, (Laos, Thailand dan Burma, disebut sebagai 'Segitiga Emas') menjadi pemain utama dalam perdagangan opium yang menguntungkan. Selama Perang Dunia II, penjajah Prancis di Asia Tenggara mendorong petani Hmong untuk memperluas produksi opium mereka sehingga Prancis dapat mempertahankan monopoli opium mereka. Setelah perang, Birma mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris, dan budidaya opium dan perdagangan mulai berkembang di negara bagian Shan. Pada akhir tahun 80an, pembentukan sebuah kediktatoran di Burma meningkatkan produksi opium di negara tersebut. Perebutan heroin terbesar di dunia dilakukan pada tahun 1988 di Bangkok. Pengiriman heroin seberat 2.400 pon, dalam perjalanan ke New York City, diduga berasal dari wilayah yang dikuasai oleh panglima perang obat bius Burma, Khun Sa.

Produksi opium di Myanmar terkait erat dengan konflik lama antara pemerintah dan etnis minoritas, termasuk Shan yang memiliki daerah budidaya terbesar dan Kachin yang meningkatkan produksi mereka dengan cepat. Di antara kelompok utama yang terlibat dalam penanaman opium dan pengolahan heroin di perbatasan Myanmar yaitu *the army of the Shan drug lord Khun Sa*; *the Shan United Army (SUA)*; *the Kuomintang (KMT*, sisa-sisa kekuatan nasionalis Cina yang berjuang Komunis Mao); Wa (suku mantan headhunter); dan tentara negara Shan timur (kelompok Kokang Cina). Pada 1980-an, Myanmar adalah produsen opium ilegal terbesar di dunia. Tahun 1981 dan 1987 negara Myanmar memproduksi opium tahunan rata-rata sekitar 700 ton, yang terus meningkat sampai 1996 ketika mencapai tingkat produksi tahunan sekitar 1.600 ton. Luas total budidaya pada 2014 diperkirakan 57.600 hektar, yang mewakili tahun pertama stabilisasi berikut meningkat berturut-turut dari tahun ke tahun sejak turun 21.600 hektar pada tahun 2006. Alasan petani dari desa-desa penanam opium di Myanmar beralih membudidayakan opium adalah untuk membuat lebih banyak uang (lebih mudah), atau untuk menutupi biaya hidup dasar seperti makanan, pendidikan dan perumahan. Defisit beras juga menurun ke tingkat yang lebih besar di desa-desa penanam opium dibandingkan desa bukan penanam opium, yang memperkuat implikasi

ini (21% penurunan desa penanam opium, berbanding 14% di desa bukan penanam opium).

Desa penanam opium mempunyai alasan yang secara teknis memaksa petani untuk membudidayakan opium. Budidaya opium dikaitkan dengan kondisi hidup yang sulit, seperti harga jual tanaman legal yang rendah, rata-rata harga beras dan jagung sedikit lebih tinggi di desa-desa penanam opium dibandingkan desa bukan penanam opium, yang mungkin mencerminkan kelangkaan produk-produk relatif lokal tersebut. Harga padi (beras dengan sekam), yang mengharuskan menghilangkan kulit sebelum konsumsi dan dapat disimpan untuk jangka waktu yang relatif lama, lebih tinggi di desa-desa yang tidak menanam opium dibandingkan desa penanam opium. Harga opium kering lebih rendah di desa bukan penanam opium daripada di desa penanam opium, yang mungkin telah berhubungan dengan ketersediaan produk berkualitas rendah untuk konsumsi lokal di desa-desa. Sumber penghasilan utama dalam hal penting di desa berkembang tanpa opium adalah pertanian, sementara di desa-desa penanam opium itu dari penjualan opium. Sumber pendapatan penting lain adalah penjualan ternak, buruh (pertanian dan non-pertanian), penjualan hasil hutan dan perdagangan kecil. Sumber pendapatan dari rumah tangga di desa-desa penanam opium kurang beragam daripada di desa-desa bukan penanam opium, di mana kerajinan, memancing dan berburu, produk karet, pekerjaan bergaji dan lain-lain yang juga diindikasikan sebagai sumber pendapatan penting.

Aksesibilitas dan jarak masyarakat miskin ke pasar memiliki efek pada biaya transaksi petani dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk membudidayakan tanaman, termasuk apakah menanam opium atau tidak. Ketika dihadapkan dengan jarak yang jauh ke pasar, beberapa pedagang opium lebih tertarik untuk mengumpulkan opium langsung dari desa-desa karena itu sangat mengurangi beban perjalanan yang diperlukan untuk mengangkut tanaman lainnya ke pasar. Jarak yang ditempuh untuk menuju pasar dengan berjalan kaki dari desa yang bukan penanam opium sekitar 1 jam 32 menit dan 2 jam 25 menit dari desa penanam opium. Jelas, desa yang bukan penanam opium cenderung lebih dekat ke pasar dari pada desa penanam opium yang tampaknya memiliki implikasi untuk keputusan petani membudidayakan tanaman dan peluang pendapatan dari berbagai barang yang dijual. Jarak yang lebih pendek ke pasar dan demikian juga untuk ke kota-kota pedesaan, tampaknya menawarkan lebih banyak kesempatan untuk berbagai macam pendapatan di desa bukan penanam opium daripada di desa penanam opium.

Bantuan pertanian yang kurang tepat juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih menanam opium. Rata-rata 8% desa-desa menerima bantuan pertanian dari pemerintah dalam 12 bulan terakhir, persentase desa penanam opium menerima bantuan pertanian sedikit lebih rendah (6%) dari pada desa yang bukan penanam opium (8%). Bantuan pertanian di desa penanam opium terutama difokuskan pada kualitas benih dan pinjaman pertanian, dengan 54% rumah tangga di desa itu sebenarnya menerima bantuan pertanian bibit yang lebih baik dan 15% menerima pinjaman pertanian.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang tingkat kejahatan transnasionalnya relatif tinggi khususnya perdagangan narkoba. Hal ini disebabkan karena kejahatan transnasional marak terjadi di kawasan yang berdekatan antar

negara. Besarnya produksi budidaya opium di Myanmar, pemerintah Myanmar pun berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Komite Pusat Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika (CCDAC) sedang mempersiapkan revisi Undang-undang Obat-obatan Narkotika dan Psikotropika tahun 1993. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengguna narkotika yang tidak mendaftarkan di pusat medis yang diakui oleh pemerintah atau yang tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk perawatan medis akan dihukum dengan hukuman penjara 3 sampai 5 tahun, dan diusulkan agar direvisi untuk menjatuhkan hukuman yang kurang berat karena dikenalkan bahwa pecandu narkotika harus diperlakukan sebagai pasien daripada penjahat. Pemerintah Myanmar menerapkan rencana pengendalian obat 15 tahun (1999-2014) yang ditujukan ke negara bebas narkotika pada tahun 2014. Rencana pengendalian obat akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap awal, prioritas utama diberikan pada pemberantasan budidaya dan produksi opium dan dalam fase yang tersisa, pemerintah menetapkan lebih banyak prioritas untuk penghapusan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pembentukan gugus tugas anti-narkotika khusus, partisipasi lokal di Pelaksanaan proses pengendalian obat dan kerja sama dengan organisasi internasional. Rencana pengendalian obat mencakup 51 kota seluas 55.112,45 mil persegi dengan populasi sekitar 3,8 juta jiwa. *The Central Committee of Drug Abuse Control* (CCDAC) di bawah Departemen Dalam Negeri adalah Agen kontra-narkotika terkemuka. CCDAC terdiri dari sejumlah karya tematik Komite (substitusi tanaman, peternakan, perawatan medis, rehabilitasi, pemuda pendidikan; penegakan hukum; Administrasi obat-obatan narkotika yang disita; hubungan Internasional; kontrol Bahan kimia prekursor; Penyelesaian kasus narkotika narkotika yang efektif, dan lain-lain) dan beroperasi 26 Unit Anti-Narkotika di seluruh negeri. CCDAC mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum Kepolisian Myanmar, Departemen Kepabeanan dan otoritas terkait lainnya, dan alternatifnya Kegiatan pembangunan bekerjasama dengan *The Ministry of Progress of Border Areas* (Kementerian Kemajuan Kawasan Perbatasan) dan *National Races dan Development Affairs*.

UNODC sebagai organisasi PBB yang bertugas memerangi obat-obatan terlarang dan kejahatan internasional. Didirikan pada tahun 1997 mengkombinasikan *United Nation Drugs Control Programme* (UNDCP) dan Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan. UNODC beroperasi di semua wilayah di dunia melalui jaringan kantor lapangan yang luas. UNODC bergantung pada kontribusi sukarela yang terutama 90% anggaran tersebut berasal dari pemerintah.

Keterlibatan UNODC di Myanmar pada tahun 1964, dalam menanggapi inisiasi dari Pemerintah Myanmar, sebuah awal Tim Gabungan Survei PBB mengunjungi negara itu untuk survei kebutuhan ekonomi dan daerah sosial yang memproduksi opium. Setelah itu, Pemerintah Myanmar memberlakukan larangan penjualan opium di Negara Bagian Shan, yang berlaku efektif pada 1 Oktober 1965. Pada tahun 1972, Ketua *International Narcotics Control Board* (INCB) dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB yang bertanggung jawab atas *United Nations Fund for Drug Abuse Control* (UNFDAC) mengunjungi Myanmar untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana PBB bisa membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kebijakan obat dan mengurangi penggunaan narkotika di Myanmar.

Upaya yang dilakukan UNODC untuk menekan produksi opium di Myanmar meliputi:

1. *Illicit Crop Monitoring Programme (ICMP)*

Dilakukan oleh *Central Commite Drug Abuse Control (CCDAC)* Myanmar, dengan dukungan dan partisipasi UNODC. Sejak tahun 2001, UNODC telah mengumpulkan informasi statistik mengenai penanaman tanaman terlarang di Myanmar, dalam rangka *Illicit Crop Monitoring Programme (ICMP)*. ICMP bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memantau tanaman terlarang dan mendukung masyarakat internasional untuk memantau sejauh mana dan evolusi tanaman terlarang dalam konteks rencana tindakan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Metodologi survei menggabungkan citra satelit dengan survei di lapangan dan desa. Dalam kombinasi, ketiga metode survei ini menyediakan informasi yang digunakan untuk menentukan tingkat budidaya opium dan produksi, serta situasi sosio-ekonomi petani di daerah penanaman opium Myanmar. Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Persatuan Myanmar (GOUM) dan pemerintah daerah di daerah-daerah yang terkena dampak budidaya opium mengembangkan rencana 15 tahun untuk menghapus produksi tanaman terlarang pada tahun 2014. Sampai tahun 2006 terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun Total area di bawah budidaya opium di Myanmar namun budidaya opium telah meningkat, meski masih jauh di bawah tingkat yang dicapai pada 1990-an. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengurangan produksi dan produksi opium hanya dapat dipertahankan jika mata pencaharian alternatif tersedia bagi masyarakat lokal. Petani sangat rentan terhadap kerugian pendapatan yang berasal dari opium, terutama mereka yang bergantung pada sumber pendapatan untuk ketahanan pangan.

Survei opium opium terdiri dari tiga komponen paralel:

- a. Survei estimasi budidaya di seluruh Negara Bagian Shan (Utara, Selatan, Timur) dan Negara bagian kachin Untuk pertama kalinya, perkiraan Chin juga disediakan, dan Bagian utara Kayah dimasukkan sekali lagi, setelah disurvei sampai 2010. Survei budidaya didasarkan pada penggunaan penginderaan jarak jauh satelit sebagai Sumber data primer, yang dilengkapi dengan survei lapangan dan untuk mendukung interpretasi ladang opium;
 - b. Sebuah survei hasil opium di tiga wilayah Negara Bagian Shan, Kayah dan Kachin;
 - c. Survei sosio-ekonomi di total 882 desa di Negara Bagian Shan dan bagian dari Kachin, Kayah dan Chin States.
2. *Pembangunan alternatif dan penghidupan yang berkelanjutan:*
UNODC memberikan bantuan kepada petani opium, sehingga memungkinkan mereka mengubah mata pencaharian pertanian mereka setelah sebuah larangan opium oleh pihak berwenang Wa. UNODC bertujuan untuk mendukung masyarakat petani di kota Hopong, Loilen, dan Pinlon di *Southern Shan State* untuk mengubah praktik pertanian yang akan melihat lebih banyak waktu dan investasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan produksi pangan beragam dan berakhirnya budidaya opium. UNODC menargetkan populasi sekitar 100.000 petani opium dan kerabat yang tinggal di 390 desa di kota ini. Proyek-proyek tersebut didanai oleh Uni Eropa dan pemerintah Jerman. Kegiatan kunci implementasi Kementerian Pertanian dan Irigasi untuk mencapai pembangunan alternatif adalah pengembangan lahan pertanian baru, penyediaan air irigasi yang memadai, penyediaan dan dukungan untuk mekanisasi pertanian, penerapan teknologi agro modern, dan pengembangan dan pemanfaatan varietas tanaman modern. Pemerintah Myanmar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui budidaya 10 tanaman utama yang

ditunjuk: padi; jagung; kacang tanah; bunga matahari; wijen; kacang hijau; kacang hijau; kacang merpati; kapas dan tebu. Sampai saat ini hasil panen ini adalah 100 keranjang/hektar untuk beras, 80 keranjang/hektar untuk jagung, 50 keranjang/biji untuk kacang tanah, 50 keranjang/hektar untuk bunga matahari, 20 keranjang/hektar untuk wijen, 20 keranjang/hektar untuk kacang hijau, 20 baskets/acre untuk kacang hijau, 25 keranjang/hektar untuk kacang merpati, 400 viss/acre untuk kapas dan 30 ton/acre untuk tebu.

Proyek sejauh ini telah mencapai hasil sebagai berikut:

- a. Pembangunan kompleks kantor proyek dan akomodasi untuk bangunan staf;
- b. Air minum yang aman untuk 28 desa Mong Pauk dan Mong Phyen;
- c. Pembangunan sekolah menengah di Hotao dan empat sekolah dasar;
- d. Pembangunan jalur panjang 24,4 km antara Pan San dan Mong Pauk untuk elektrifikasi;
- e. Distribusi 125 ekor babi ke penduduk desa;
- f. Elektrifikasi Nam Lwe Catchments Daerah dengan mendirikan jaringan listrik antara desa Mong Phyen dan Wanli;
- g. Pembangunan bendungan pengalihan Panlin di daerah Mongkar;
- h. Pembangunan kanal sepanjang 5,8 km di Mongkar dibantu oleh Japan *Human Security Fund*;
- i. Pembangunan rumah sakit 25 tempat tidur di Mong Pauk, dibuka pada tanggal 9 Mei 2002; Di bawah Bantuan Hibah Grassroots Jepang;

Distribusi bibit tanaman pengganti padi, kacang-kacangan, kacang tumbuk, gandum, mustard, kedelai, soba, kentang, kapas sampai petani.

Banyak masalah-masalah yang penting yang harus lebih diperhatikan dalam penangan program pembangunan alternative bagi masyarakat guna untuk memaksimalkan program yang telah dijalankan sebelumnya.

Masalah-masalah khusus yang perlu untuk ditindak:

- a. ***Ketersediaan dan pemanfaatan lahan:*** Untuk melihat bagaimana lahan pertanian rata-rata kurang dari 1 hektar (ha) per rumah tangga dapat diperbesar, atau sebaliknya, memperbesar ukuran plot komunal oleh pihak berwenang sehingga dapat meningkatkan penanaman tanaman.
- b. ***Praktek pertanian:*** Mendiversifikasi tanaman pangan, memperbaiki peternakan, perikanan dan pertanian melalui masukan teknologi pertanian baru untuk meningkatkan produksi pangan per hektar dan mengurangi dampak negatif dari kondisi iklim.
- c. ***Akses pasar:*** Memperkenalkan kesempatan agribisnis di tingkat desa untuk memberi nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan dan pemasaran ke kota dan desa lain.
- d. ***Infrastruktur sosial, kesehatan dan fisik dasar:*** Mengupgrade infrastruktur yang ada (jalur dan jalur desa off-road), memperbaiki sanitasi (pembuangan air bersih dan pembuangan limbah) dan mengenalkan layanan baru (listrik tenaga surya dan hidrogenasi, dan vaksinasi).
- e. ***Organisasi Berbasis Desa (VBOs):*** Untuk memperkuat fungsi dan efektivitas organisasi masyarakat ini untuk memastikan mereka terlibat aktif dalam perencanaan, pengorganisasian dan penerapan komponen kunci dari intervensi ini.

- f. **Ekonomi berbasis opium:** Dengan bantuan pemerintah daerah, komitmen yang aman dari para petani untuk memberikan dukungan untuk penggantian opium dengan tanaman pangan dengan cepat.
 - g. **Perempuan dan anak-anak sebagai buruh tani:** Untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak dipertimbangkan dan masukan diberikan untuk mengurangi keterlibatan langsung mereka dalam pekerjaan pertanian, sambil memperkuat peran perempuan dalam perawatan kesehatan dan gizi rumah tangga.
 - h. **Kecanduan obat:** Untuk menggunakan pencegahan dan pengobatan berbasis masyarakat untuk mengobati pecandu opium.
3. *UNODC Global SMART Programme*
UNODC Global Synthetic Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Programme diluncurkan pada bulan September 2008. Tujuan menyeluruh dari program ini adalah untuk mendukung negara-negara anggota untuk membuat keputusan berbasis bukti yang efektif, untuk merancang tanggapan untuk mengatasi masalah obat-obatan sintesis. Myanmar telah menjadi salah satu negara prioritas SMART di wilayah ini.
- Di Myanmar, program telah berfokus pada:
- a. Meningkatkan basis informasi dan analisis situasi ATS di negara ini
 - b. Mengidentifikasi mekanisme pembagian data formal / informal yang ada pada ATS
 - c. Memfasilitasi diskusi tentang pembangkitan data ATS dan pembagian data antara hukum Penegakan hukum, instansi kesehatan dan perawatan
 - d. Memfasilitasi diskusi tentang sharing data ATS antara instansi pemerintah dan LSM / LSM internasional
 - e. Memulai proses untuk menyiapkan mekanisme pembagian informasi mengenai aspek kesehatan dan perawatan ATS di negara ini.

UNODC Global Synthetic Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART) Programme menyumbangkan 30 peralatan pengujian obat lapang ke Komite Pusat Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba Myanmar (CCDAC). UNODC juga memberikan pelatihan satu setengah hari tentang cara menggunakan perangkat ini kepada 25 petugas forensik dan petugas garis depan dari Pasukan Tugas Anti-Narkotika, Akademi Kepolisian Nasional dan Kantor Pemeriksa Kimia. Pelatihan tersebut dilakukan di Yangon di Museum Penghapusan Obat Myanmar pada tanggal 13-14 November 2012. UNODC juga memproduksi alat pengujian dasar yang membantu mengidentifikasi bahan kimia dasar yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan, seperti anhidrida asetat, yang digunakan untuk membuat heroin.

Program UNODC yang relevan lainnya yaitu *Program Pelatihan Berbasis Komputer UNODC (CBT)*. UNODC telah memberikan bantuan teknis kepada negara-negara Anggota untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir transnasional melalui pelatihan berbasis komputer (CBT). Unit CBT mengkoordinasikan dan melaksanakan operasi dari *Regional Centre* di Bangkok.

Rincian pelaksanaan CBT di Myanmar adalah:

- a. *14 CBT Center* di Myanmar
- b. *Focal point* utama meliputi Polisi, Bea Cukai, Departemen Investigasi Kriminal (CID)

- c. Operasi CBT telah dilakukan di:
 - 1. Lembaga Pelatihan Pusat Kepolisian Myanmar, Mandalay
 - 2. *Customs Department*, Yangon Kantor Penghubung Perbatasan (di sepanjang perbatasan Myanmar).

Program kerjasama UNODC dengan NGO dan INGO

1. Bantuan oleh World Food Programme (WFP)

UNODC berkoordinasi dengan WFP untuk mendistribusikan makanan sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak. Setelah komite manajemen makanan menentukan rumah tangga yang paling tidak aman dan rentan terhadap pangan, makanan didistribusikan dalam kerjasama yang erat dengan WFP, CCDAC Myanmar dan pemerintah daerah setempat, dan masyarakat setempat. Bagi individu yang terkena dampak, distribusi makanan darurat memiliki dampak yang signifikan.

Pada tahun 2011, rencana WFP:

- a. Untuk menyediakan kesempatan penghidupan yang berkelanjutan bagi 335.000 mantan petani opium dan keluarga mereka dengan 4.100 mt makanan, melalui makanan untuk pekerjaan dan makanan untuk program pelatihan. Proyek bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan lahan, sistem irigasi dan perbaikan praktik pertanian;
- b. Di sekolah-sekolah yang ditargetkan, pendaftaran dan kehadiran anak-anak dipastikan melalui makanan untuk program pendidikan, yang memberikan jatah keluarga bulanan kepada 79.000 siswa yang bersekolah, dan merupakan jaring pengaman bagi rumah tangga yang rentan, melalui pendistribusian 4.700 mt beras;
- c. WFP juga menyediakan makanan bergizi bagi pasien HIV/AIDS dan TB yang sedang diobati, juga untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun dan ibu hamil dan menyusui. Secara total, 5.200 penerima manfaat ini akan menerima 418 mt komoditas campuran, termasuk makanan campuran yang diperkaya.

Dengan demikian, pada tahun 2011, 514 mt makanan telah didistribusikan ke 100.000 penerima bantuan, dengan total biaya sebesar US \$ 400.000. Kegiatan dilaksanakan langsung oleh WFP atau melalui mitra kerja sama. WFP bekerja dengan sembilan LSM internasional dan lokal (ADRA, AHRN, AMDA, AZG, CARE, KMSS, NAG, WHH, WV) yang melengkapi bantuan pangan dan memaksimalkan manfaat dari kegiatan tersebut. Inisiatif Kokang dan Wa (KOWI) didirikan untuk mengembangkan pendekatan holistik terhadap pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan di wilayah ini. Mitra bertemu secara teratur di Yangon dan di lapangan.

Pada bulan Juli 2010, pemerintah meminta WFP untuk menanggukkan kegiatannya di wilayah Wa sampai pemberitahuan lebih lanjut. Di daerah Taunggyi, negara bagian selatan Shan, WFP beroperasi di tiga kota: Hsihseng, Phe Khone, dan Pin Laung. Tahun lalu, pemerintah meminta WFP untuk keluar dari Phe Khone dan Pin Laung. Namun, ada bukti bahwa budidaya opium telah dimulai kembali di beberapa wilayah di Negara Bagian Shan selatan, dan para petani semakin bergantung pada penanaman bunga opium untuk sumber pendapatan utama mereka. WFP berencana

untuk memperluas wilayah operasionalnya untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga rentan dan menawarkan program mata pencaharian alternatif. Pada bulan Januari 2011, sebuah permintaan dikirim ke pemerintah untuk menargetkan kota-kota tambahan berikut: Pin Lone, Loi Lin, Nam Sam dan Mauk Mae. Di wilayah ini, penargetan desa serta kegiatan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan bersamaan dengan UNODC.

2. *Pengurangan Permintaan Obat-obatan, pencegahan dan perawatan HIV/AIDS*

UNODC bekerja di 17 kota dari prioritas Rencana Strategis HIV Nasional Kota yang membutuhkan intervensi HIV. Selain itu, UNODC juga menyediakan pelatihan kesadaran tentang HIV dan AIDS kepada petugas penegak hukum. Program HIV UNODC diimplementasikan dengan dukungan dari Tiga Dana Penyakit dan pemerintah Australia. Saat ini, kegiatan program HIV adalah dilaksanakan di negara bagian Kachin, negara bagian Shan, divisi Mandalay dan divisi Yangon. Pemrograman yang didukung oleh UNODC disampaikan melalui strategi *drop-in* dan *outreach* dan menargetkan 16.000 pengguna narkoba suntik dan non-suntik. Kantor Negara UNODC di Myanmar (COMYA) merumuskan Proyek DDR Berbasis Komunitas di tiga kota utama di negara bagian Shan utara. Ini adalah proyek yang komprehensif, mencakup 30 desa, dan melibatkan kegiatan seperti advokasi, pendidikan pencegahan narkoba, pengobatan berbasis masyarakat dan rehabilitasi, obat-obatan dan kesadaran HIV/AIDS, jenis kelamin, kredit mikro untuk perempuan di masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Bersamaan dengan itu, UNODC, bersama dengan UNAIDS, melatih petugas polisi tentang masalah hukum terkait narkoba dan HIV/AIDS. Mitra Pelaksana Proyek adalah *CARE Myanmar*. Sebuah proyek yang didanai Komisi Eropa, Mengurangi Penggunaan Narkoba yang Menyusul dan Konsekuensi Berbahaya di Union of Myanmar, mencakup wilayah yang sama di Negara Bagian Shan Utara dan Negara Bagian Kachin selama fase pertama, dengan Mitra INGO seperti *CARE Myanmar* dan *Medicine du Monde*. Salah satu yang menarik dari proyek ini adalah bahwa UNODC diizinkan untuk melatih staf penjara, juga narapidana, tentang obat-obatan terlarang dan pencegahan HIV/AIDS di 30 penjara dan kamp. Dalam kerangka Dana untuk HIV/AIDS di Myanmar (FHAM), UNODC bertanggung jawab atas pembentukan Unit Koordinasi Teknis, yang bekerja untuk mengkoordinasikan semua mitra yang bekerja di bidang HIV/AIDS. Meskipun Proyek menyelesaikan masa jabatan formalnya pada bulan Mei 2007, kegiatan tersebut terus berlanjut. Proyek ini dilaksanakan dalam kemitraan dengan Komite Manajemen Proyek Kota, LSM Internasional, LSM dan Organisasi Berbasis Komunitas untuk menyediakan kegiatan pencegahan, layanan kesehatan dasar dan pendistribusian bahan penahanan infeksi kepada pengguna napza suntik, pasangan mereka, dan keluarga mereka, melalui *Drop-in-center* dan kegiatan penjangkauan. Kegiatan proyek penjangkauan dikaitkan dengan layanan rujukan ke perawatan narkoba dan aktivitas perawatan metadona jika memungkinkan. Sejak Januari 2008, UNODC terlibat dalam pelaksanaan proyek Mengurangi penyebaran HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik melalui Program Fleksibel Negara HAARP di Myanmar. Proyek ini memiliki komponen advokasi yang kuat, yang dirancang untuk mempengaruhi pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap program nasional terkait narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas masalah tingginya produksi opium di Myanmar yang sangat rekat kaitannya dengan kemiskinan yang dialami masyarakat Myanmar, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Myanmar sendiri dan dari kerjasama dengan UNODC untuk mengurangi produksi opium tersebut berhasil mencapai penurunan sekitar 22% dari tahun sebelumnya, dan juga harga opium mengalami penurunan sekitar 17% dari tahun 2013.

UNODC merupakan organisasi yang menangani kejahatan narkoba bentukan dari Perserikatan Bangsa Bangsa, Myanmar sebagai anggota PBB pun menjadi salah satu fokus dalam penanganan opium dengan produksi yang terbesar di Segitiga Emas yang berada di Asia Tenggara. Dari program-program yang dijalankan oleh UNODC, pemerintah Myanmar serta bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya terus berlanjut ketahun-tahun berikutnya untuk mencapai negara bebas narkoba.

Referensi

Buku

Barkin, J Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.

Booth Martin, *Opium: A History*, St. Martin's Press, 2013

Stephen D. Krasner (ed). 1983. *International Regimes*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Stephan Haggard and Beth A. Simmons, *Theories of International Regimes International Organization* Vol. 41, No. 3 (Summer, 1987).

Sue Williams dan Carlos Milani, "The Globalization of Drug Trade," *Sources* 111 (April 1999).

Jurnal

Badan Narkotika Nasional, "Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2010-2014 (REVIU)".pdf

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, CORDROGUE 8 ASIE 3.pdf

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION CORDROGUE 36 ASIE 52.pdf

Peran *ASEAN Senior Officials Drug Matter (ASOD)* dalam menanggulangi perdagangan opium 2006-2013.pdf

United Nation On Drug Crime "Southeast Asia Opium Survey 2015".pdf

United Nation On Drug Crime SOUTH EAST ASIA OPIUM SURVEYS 2011 Lao PDR, Myanmar.pdf

United Nation On Drug Crime "Southeast Asia Opium Survey 2014, Lao PDR, Myanmar".pdf

UNODC, *Executive summary of the report on recommendations for the amendments of the Myanmar 1993 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law of Myanmar December 2014.pdf*

Upaya Asean Dalam Menanggulangi Perdagangan Dan Peredaran Narkotika Ilegal Di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012).

Internet

“About UNODC”, dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop>, diakses pada tanggal 12 januari 2017.

“ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs”, dalam http://asean.org/?static_post=asean-declaration-of-principles-to-combat-the-abuse-of-narcotics-drugs-manila-26-june-1976

Drug Lords, Ethnic Groups in Myanmar, dalam http://factsanddetails.com/southeast-asia/Myanmar/sub5_5g/entry-3077.html#chapter-9

Fighting illicit drugs in Myanmar by giving law enforcement better equipment, dalam <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2012/11/drug-testing-kits/story.html>

History Of Opium, Morphine, And Heroin, dalam <http://www.intheknowzone.com/substance-abuse-topics/heroin/history.html>

“OBAT-OBATAN PENGHILANG RASA SAKIT: SEJARAH SINGKAT “, dalam <http://id.drugfreeworld.org/drugfacts/painkillers/a-short-history.html>

“*Opium production in myanmar and the lao peoples democratic republic stabilizes at high levels*” dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2015/December/opium-production-in-myanmar-and-the-lao-peoples-democratic-republic-stabilizes-at-high-levels.html>

“*UNODC alternative development programme in Myanmar gets boost from UN Sec-Gen*”, dalam <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/2012/05/bkm-visit/story.html>

“*UNODC’s History in Myanmar*”, dalam <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/myanmar/history.html>

“*UNOCD, “Statistic on Drug Trafficking Trend in East, South-East, and South Asia, Oceania and Worldwide,” UNOCD Honlap*